

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEWENANGAN
SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NO. 6
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM (STUDI KASUS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Oleh:

Aldi Ahmad Nugroho

NIM. 05020421025



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Ahmad Nugroho
NIM : 05020421025
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Kewenangan Satpol PP Dalam
Penegakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 Terhadap
Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kediri

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Mei 2025

Yang menyatakan,


Aldi Ahmad Nugroho
NIM. 05020421025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aldi Ahmad Nugroho

NIM : 05020421025

Judul : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Kewenangan Satpol PP Dalam
Penegakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 Terhadap
Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kediri

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 14 Mei 2024
Pembimbing,



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aldi Ahmad Nugroho

NIM. : 05020421025

Judul : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kediri)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Drs. H. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji II

Prof. Dr. M. Mul. Fathoni Hasvim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji III

Ikhsan Hatah Yasin, S.H.I. M.H.
NIP. 197803102005011004

Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 26 Agustus 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Hi. Sugiyanto Musafahah, M.Ag.
NIP. 193271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aldi Ahmad Nugroho

NIM : 05020421025

Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara

E-mail address : aldiahmadnugroho79@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....) yang berjudul :

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEWENANGAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM (STUDI KASUS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KEDIRI)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 September 2025

Penulis

(Aldi Ahmad Nugroho)

ABSTRAK

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Kediri menjadi isu krusial yang berkaitan dengan ketertiban umum dan pemanfaatan fasilitas publik. Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengatur hal ini melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap PKL di Kabupaten Kediri menurut Perda tersebut dan bagaimana hal tersebut ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan Perda terhadap PKL dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Kediri, pelaku PKL, dan pihak terkait. Sumber sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan referensi keislaman terkait siyasah dusturiyah. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Perda terhadap PKL oleh Satpol PP masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan SDM, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, pendekatan yang digunakan lebih bersifat represif daripada persuasif. Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, tindakan pemerintah melalui Satpol PP sudah memiliki legitimasi sebagai bagian dari ulil amri, namun dalam praktiknya perlu mengedepankan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial sesuai nilai-nilai Islam.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah melalui Satpol PP meningkatkan pendekatan pembinaan dan sosialisasi hukum kepada para PKL, serta menyediakan lokasi yang layak bagi mereka untuk berusaha. Selain itu, penegakan hukum hendaknya memperhatikan dimensi keadilan dan kemaslahatan dalam Islam sebagaimana diatur dalam fiqh siyasah dusturiyah.

DAFTAR ISI

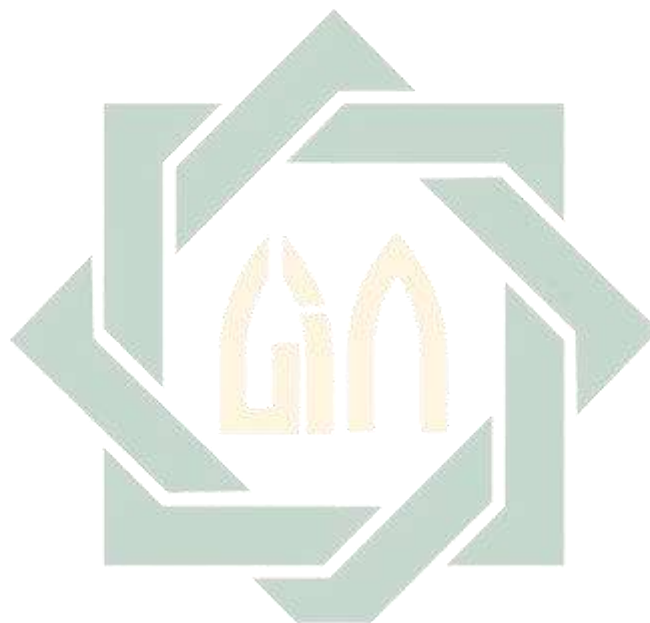
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu (Kajian Pustaka).....	10
G. Landasan Teori.....	13
H. Definisi Operasional.....	17
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KERANGKA TEORI.....	23
A. Konsep Siyasah Dusturiyah	23
B. Teori Kewenangan	32

C. Penegakan Hukum.....	36
D. Peraturan Daerah.....	45
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	50
A. Profil Kabupaten Kediri.....	50
B. Pedagang Kaki Lima	55
C. Satuan Polisi Pamong Praja	66
BAB IV PEMBAHASAN	98
A. Faktor Yang Menghambat Dalam Penegakan Hukum terhadap PKL di Wilayah Kabupaten Kediri menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017.....	98
B. Penegakan Hukum terhadap PKL di Kabupaten Kediri menurut <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	103
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	117

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kediri.....	76
Tabel 3. 2 Data Jumlah Personel/Anggota Satpol PP PNS Kab. Kediri	78
Tabel 3. 3 Data Jumlah Personel/Anggota Satpol PP Non PNS Kab. Kediri	78
Tabel 3. 4 Data Jumlah Kendaraan Operasional Satpol PP Kab. Kediri	79
Table 3. 5 Rekapitulasi Data UMKM di Kabupaten Kediri.....	83
Tabel 3. 6 Rekapitulasi Data Pelanggaran Pedagang Kaki Lima Kab. Kediri Tahun 2023-2025.....	89



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Kabupaten Kediri.....	54
Gambar 3. 2 Dokumentasi Operasi Penertiban PKL	88



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan: Respons Islam terhadap Demokrasi*.

Jakarta: Paramadina, 2002.

Ahmad Azhar Basyir. *Sistem Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1994.

Ali, Zainuddin. *Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Al-Qur'an al-Karim. Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

Asmuni, Mochammad. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2020.

Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Teras, 2013.

Damsar. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.

Dewi, Ratih. "Efektivitas Penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Yogyakarta." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10, no. 1 (2021): 45–58.

Harjasumantri, Kusnadi. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1986.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Liau, Gasper, *Administrasi Pembangunan: Studi Kajian PKL*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

M. Ali Zainuddin, *Peran Satpol PP dalam Penertiban PKL: Studi Sosial dan Kebijakan di*

Kota Besar. Jakarta: Gramedia, 2019.

Manan, Bagir. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Mu'in, Fathul. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Mujib, Abdul dan Amir Ghofur. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 2000.

Siti Musdah Mulia. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983.

Syahrani, Ridwan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam & HuMa, 2002.

Zainuddin Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Skripsi:

Adit Septo, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Jalan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu)." Skripsi., Universitas Bengkulu, 2020.

Arif Wibowo Saragih, "Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)." Skripsi., Universitas Sumatera Utara, 2018.

Rizkan Fachrudiansah, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang

Lebong).” Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddien, 2013.

Jurnal:

Akbar, Farid. “Rekonstruksi Hukum Penataan PKL Berbasis Hak Ekonomi.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 4, 2018. 14.

Deni Sudrajat, “Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus PKL Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 2, 2021.

Fadillah, Muhammad. “Konstruksi Penegakan Perda dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2019.

Ma’arif, Husein. “Konsep Kemaslahatan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Jurnal Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, Vol. 5 No. 1, 2020.

Muslih, Muhammad. “Penegakan Perda Terhadap PKL dalam Perspektif Maqasid Syariah.” *Jurnal Al-Adalah*, vol. 13, no. 2 (2018): 235–251.

Nurhadi, Nurhadi. “Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (March 20, 2019): 52-71.

Putra, Aditya. “Penegakan Hukum oleh Satpol PP Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 89–104.

Yulia, Endah. “Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 22, no. 1 (2021): 43–55.

Rachmat Rukmana, “Pendekatan Humanis dalam Penegakan Hukum terhadap PKL”, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Dokumen:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Peraturan Bupati Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Peraturan Bupati Kediri No. 25 Tahun 2024 Tentang Ketertiban Umum di Kawasan Bandar Udara Dhoho.

Wawancara:

Yusuf Abraham. Kepala Bidang PPUD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.

Wawancara. Kediri, 18 Maret 2025

Pak Airlangga. Pedagang Kaki Lima, Wawancara, Kediri, 29 juni 2025.

Ibu Susan, Pedagang Kaki Lima, Wawancara, Kediri, 30 Juni 2025

Ibu Sri Wahyuni, Pedagang Kaki Lima, Wawancara, Kediri, 1 Juli 2025

Ibu Indah, Pedagang Kaki Lima, Wawancara, Kediri, 1 Juli 2025

Ibu Selvi, Pedagang Kaki Lima, Wawancara, Kediri, 3 Juli 2025



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A